# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur merupakan kerangka yang disusun oleh peneliti untuk mengklarifikasikan sumber data serta informasi umum yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian. Tinjauan literatur memiliki tujuan di mana untuk mendapatkan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji*.* Dalam tulisan ini permasalahan yang akan dikaji adalah **Peran *World Bank* dalam membangun infrastruktur di Jalur Gaza** yang akan diolah untuk memecahkan masalah yang diteliti disesuaikan dengan kerangka berpikir ilmiah. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menghimpun informasi dari tulisan terdahulu yang relevan dengan topik yang diantaranya bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, press release, skripsi, dan berita-berita resmi. Beberapa literature yang dirujuk oleh peneliti karena keterkaitan dengan penelitian, diantaranya:

Literatur pertama, skripsi yang ditulis oleh **Fiqhi Rizky Dengo** tahun 2014 dengan judul penelitian **“*Peran Bank Dunia Terhadap Kebijakan Kesehatan di Indonesia*”**.(Dengo, 2014) Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai peran *World Bank* dalam perkembangan di Indonesia mengenai perumusan kebijakan kesehatan melalui program yang dinamakan *Provincial Health Project* yang disingkat PHP*.* *World Bank* memberikan bantuan luar negeri berupa pinjaman kepada pemerintahan Indonesia. Penerbitan program PHP tersebut telah dilaksanakan 3 kali dan secara menyeluruh telah berhasil melaksanakan perubahan arah kebijakan kesehatan nasional berlandaskan desentralisasi menjadi pendorong bagi reformasi kesehatan oleh Pemerintah Indonesia. Program *World Bank* tersebut juga terkait bersama “Kebijakan Jaminan Kesehatan” yang memiliki tujuan untuk penyadaran serta terdapat gagasan pembangunan kesehatan di negara berkembang. *World Health Organization* bersama dengan *World Bank* telah menggagas paradigma *Health for All* yang melandasi kebijakan tersebut untuk melaksanakan *Universal Health Coverage* yang menjadi tajuk bagi program kesehatan dunia.

Dalam penelitian tersebut terdapat tujuan dari *World Bank* yang secara umum yaitu untuk mengurangi kemiskinan, ada pula tujuan lain yang dapat kita lihat dalam dokumen dasar dari IBRD dan IDA yang merupakan institusi *World Bank.* Dokumen tersebuh menjadi landasan hokum dan konstitusi dasar dari *World Bank* dikenal sebagai *Articles of Agreement.* Pada anggaran dasar pasal 1 IBRD telah disampaikan tujuan pendirianya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan penanaman modal maupun pinjaman kepada negara anggota guna kepentingan produksi agar mendorong perbaikan serta pembangunan yang terjadi.
2. Memberikan jaminan ataupun bisa melakukan partisipasi secara langsung dalam memberikan pinjaman guna membantu penanaman modal asing.
3. Mengembangkan pertumbuhan neraca jangka panjang di dalam perdagangan internasional serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran.
4. Adanya pengaturan pinjaman yang memiliki manfaat lebih untuk hal-hal yang lebih penting.
5. Kegiatan umum yang terjadi di dalam wilayah negara anggota terdapat adanya hubungan yand bisa memberikan dampak terhadap penanaman modal ataupun perdagangan internasional.

Menurut anggaran dasar IDA pasal 1, menjelaskan bahwasannya tujuan tersebut untuk memberikan bantuan pembanguan ekonomi, meningkatkan produktivitas serta dengan demikian meningkatkan standar hidup di wilayah negara berkembang, khususnya negara yang termasuk dalam keanggotaan, secara khusus menyediakan dana untuk memenuhi pembangunan dengan keringanan dalam persyaratannya serta tidak terlalu membawa pengaruh terhadap neraca pembayaran jika dibandingkan dengan pinjaman biasa.

Rumusan kebijakan di Indonesia tersebut menerima dampak yang signifikan dari bantuan dari *World Bank*, khususnya kebijakan kesehatan. Kolaborasi antara *World Bank* dan pemerintah Indonesia dapat terlihat dari warna pembangunan kesehatan, bermula pada pergeseran paradigma kesehatan, lalu arah kebijakan kesehatan yang mengalami pergantian, serta pelaksanaan sistem kesehatan nasional yang beberapakali terjadi pergantian.

Pada penelitian tersebut, Fiqhi berargumen bahwa bantuan luar negeri dapat berimplikasi dengan baik apabila digunakan dengan sesuai. Setiap pengambilan keputusan harus dikaji terlebih dahulu mengenai bantuan yang diterima bisa memenuhi kepentingan lebih banyak masyarakat atau hanya sebagian. Meskipun secara positif *World Bank* berperan dalam reformasi kebijakan kesehatan, namun tidak seharusnya pemerintah berharap sepenuhnya terhadap sebuah lembaga. Dengan alasan bisa saja pemerintah kehilangan peran manjadi pengelola pengembangan kesehatan serta terperangkap di dalam komersialisasi’kesehatan. Pengelolaan sistem kesehatan mandiri perlu diupayakan dan ditingkatkan kembali.

Selanjutnya skripsi dengan judul **“Konflik Israel-Palestina Kajian Historis atas kasus perebutan tanah antara Israel dan Palestina Tahun 1920-1993”** ditulis oleh **Moh. Hamli** pada tahun 2013 perihal kajian historis konflik antara Palestina-Israel yang membahas secara lebih mendalam mengenai awal mula konflik tersebut.(Hamli, 2013) Banyak perubahan serta jatuhnya korban jiwa diantara kedua negara. Peta tanah Palestina yang terlihat mengalami perubahan disetiap tahunnya karena adanya pendudukan dari Negara Israel. Penelitian tersebut telah memperlihatkan data korban dari Palestina berjumlah 7978 dan Israel 1503 yang berjatuhan diakibatkan oleh dampak konflik antara kedua negara tersebut yang terjadi dari tahun 1987-2011.

Faktor agama dari kedua belah pihak menjadi faktor yang paling menonjol dalam konflik Palestina-Israel tersebut. Adanya sebuah pernyataan dari kaum Yahudi yang beranggapan bahwa mereka merupakan bangsa terpilih dibandingkan dengan bangsa lainnya. Pernyataan tersebut berlanjut hingga Israel menyatakan bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang suci di mana Tuhan telah menjanjikannya bagi mereka. Dan bagi muslim, tanah tersebut merupakan tanah yang sangat berharga dan suci. Meskipun klaim mengenai tanah yang suci dan dijanjikan oleh Tuhan tidak ada diutarakan oleh orang-orang muslim, akan tetapi para muslim dari Palestina telah memiliki beberapa masjid yang suci, Masjid Al-Aqsha yang menjadi salah satunya dan berlokasi di Yerussalem.

Politik dan ekonomipun menjadi faktor penting lain penyebab tidak adanya penyelesaian konflik antara kedua negara. Amerika Serikat beserta negara yang bekerjasama dengannya berusaha mendapatkan posisi terdepan didalam sebuah konflik maupun perdamaian. Karena Amerika Serikat perlu memiliki kawasan strategis di wilayah Timur tengah agar dapat menyebarkan pengaruhnya disana. Dan pada akhirnya tindakan tersebut berdampak pada penguasaan ekonomi pada wilayah tersebut karena wilayah Timur Tengah dikenal sebagai kawasan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan gas dan minyak. Kebutuhan Amerika Serikat akan energi sangatlah tinggi agar dapat menumbuhkan ekonomi dinegaranya. Tak hanya Israel yang menjadi sekutu bagi Amerika, Palestina pun mendapatkan sokongan dari Arab Saudi, Lebanon, Iran, serta Mesir. Dukungan tersebut selain karena Palestina merupakan negara muslim, pula karena Palestina merupakan bangsa Arab.

Konflik antara Palestina-Israel ini terdapat ketidakseimbangan pada pihak Palestina, karena lebih merasakan kerugian yang signifikan. Dalam konflik tersebut Israel yang memiliki alasan perlindungan diri dengan cara melancarkan agresi namun pihak Israel sekaligus melakukan perluasan wilayah yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh PBB. Para pendukung utama atas berdirinya Israel yang antara lain negara-negara Barat seolah tidak memiliki taring saat terjadinya penindasan di Palestina. Namun saat terdapat roket yang diluncurkan terhadap Israel secara cepat Amerika Serikat mengambil tindakan kecaman terhadap pihak Palestina.

## Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah proses penelitian, tentu memerlukan adanya landasan berpijak guna menguatkan sebuah analisa. Oleh sebab itu, pada saat melakukan pengamatan serta analisa masalah, diperlukan landasan teori ataupun konseptual yang sesuai.

Teori peran merupakan pijakan utama dalam penelitian ini. Peran sendiri merupakan sebuah gabungan dari, teori, orientasi, serta disiplin ilmu. Awal dari teori tersebut tidak sepenuhnya dari psikologi, melainkan dari sosiologi serta antropologi. Dari tiga ilmu tadi, kata “peran” tersebut diadaptasi dari dunia teater. Karena didalam sebuah teater, seorang aktor perlu memposisikan dirinya menjadi tokoh yang ditentukan dan pada posisinya sebagai tokoh pun telah diharapkan untuk memiliki perilaku yang sesuai dengan ditentukannya. Melihat posisi individu dalam masyarakat cenderung sesuai dengan posisi seorang aktor didalam sebuah teater, dalam artian perilaku individu tersebut tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan memiliki kaitan dengan individu lain yang memiliki hubungan dengan individu tersebut. Teori-teori peran pun disusun dari sudut pandang tersebut.(Sarwono, 2005)

Pada tahun 1936, seorang antropolog bernama Linton telah mengembangkan teori peran. Di dalam bukunya yang berujudul *The Study of Man* menjelaskan bahwa

**“Teori peran dapat menggambarkan suatu interaksi sosial dalam terminologi aktor yang bermain sama dengan yang ditetapkan oleh budaya. Harapan peran adalah pemahaman bersama yang dapat menuntun individu agar memiliki perilaku dalam kehidupan sehari-harinya.”**(Linton, 1936)

Dari pandangan teori ini, seorang individu yang memiliki peran tertentu sebagai contohnya orangtua, mahasiswa, dokter, serta peran individu lainnya, diharapkan dapat memiliki perilaku yang sesuai dengan peran yang dimilikinya. Seperti mengapa individu tersebut harus menjaga keamanan negara dan individu yang berada didalamnya, dikarenakan perannya sebagai seorang tentara. Alasan utamanya adalah posisinya adalah tentara, maka ia perlu menjaga keamanan negaranya dan individu yang berada didalamnya karena peran sosialnya telah menentukan bagaimana seorang tentara seharusnya berperilaku.(Hutami & Hariri, 2011)

Dalam jurnal berjudul “*Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial”* yang ditulis oleh Hasan Mustafa terdapat seorang sosiolog bernama Glen Elder di tahun 1975 yang mencoba memberi bantuan perihal bagaimana teori peran digunakan dengan lebih luas. Menggunakan pendekatan dengan istilah *“life-course”,* makna dari pendekatan tersebut bahwasannya seluruh individu didalam sebuah masyarakat memiliki keinginan terhadap individu lain didalamnya agar berperilaku sesuai dengan kategori usia yang berlaku.(Mustafa, 2011)

Selain itu, teori peran dalam literatur perilaku organisasi dikenalkan oleh Kahn *et al.* Mereka menjelaskan bahwa dalam ranah organisasi bisa menjadi pengaruh bagi keinginan seluruh individu tentang perilakunya.(Zaini & Taylor, 2009) Keinginan itu mengandung etika ataupun desakan bagi tindakan pada upaya tertentu. Seseorang individu dapat memperoleh amanat lalu menginterpretasikannya serta memberi respon dengan beragam cara. Dapat menimbulkan persoalan apabila amanat disampaikan dengan tidak akurat, sulit untuk diinterprestasikan, serta terjadi ketidaksesuaian pada pemahaman individu yang memperoleh amanat tersebut. Amanat tersebut akan dipandang ambigu dan juga memuat unsur masalah.(Hutami & Hariri, 2011)

Keinginan terhadap peran bisa tercipta melalui peran itu sendiri. Pengendalian peran dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan akan peran tersebut. Seluruh individu pemegang wewenang suatu peran hendak membangun keinginan tersebut.(Zaini & Taylor, 2009) Seperti harapan yang terbentuk pada masyarakat di Jalur Gaza, di mana masyarakat tersebut telah menjadi korban dari dampak konflik yang terjadi antara Palestina-Israel. Mereka memiliki ketergantungan pada hasil program yang diciptakan oleh *World Bank* dalam membangun infrastruktur di wilayah Gaza tersebut.

Sebuah konsep yang dinamakan ambiguitas peran menjelaskan tentang tersedianya keterangan yang memiliki kaitan pada peran. Seseorang yang memiliki peran perlu untuk memahami mengenai apakah keinginan tersebut dapat dinyatakan benar serta selaras dengan kegiatan tersebut bisa memenuhi kewajiban dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan.(Zaini & Taylor, 2009)

Menurut Kahn *et al.,*sama halnya dengan konflik peran, bahwa ambiguitas peran pun dapat meningkatkan rasa ketidakpuasan*,* kecemasan, memutarbalikkan fakta, dan kinerjanya menurun pada diri seseorang. Khan *et al.* pun menjelaskan bahwa ketika kompleksitas organisasi melebihi rentang pemahaman seseorang dapat membuat ambiguitas peran meningkat.(Zaini & Taylor, 2009)

*World Bank* adalah sebuah lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan bantuan luar negeri dengan bentuk pinjaman ke negara-negara berkembang. Bantuan luar negeri memiliki istilah yang dimaknai sebagai bentuk aktivitas negara, bangsa, lembaga yang berada dalam sebuah negara tertentu maupun pasar tertentu didunia, menyerahkan bantuan dalam bentuk pinjaman, memberikan donasi dan juga investasi terhadap pihak tertentu di negara lain. Dalam istilah lain, negara yang menjadi penerima bantuan luar negeri tersebut bisa memanfaatkannya untuk mengentaskan permasalahan ekonomi, lingkungan, ataupun permasalahan kemanusiaan yang biasa terjadi didalam wilayah negara berkembang.(Ikbar, 2007)

Bantuan luar negeri dibedakan menjadi 3 yaitu: (Ikbar, 2007)

1. Bantuan berbentuk pemberian, bantuan ini merupakan bentuk bantuan bagi para negara berkembang dan juga tidak dalam bentuk uang saja, melainkan bisa dalam bentuk barang, dan bantuan ini dimanfaatkan untuk aktivitas sosial contohnya apabila terjadi musibah serta bencana sosial yang lain.
2. Bantuan berbentuk utang, di mana bantuan ini berupa uang atau modal, pembayaran pinjaman modal tersebut menggunakan metode cicil dan juga perlu melunasi bunga bantuan pinjaman, namun sering timbul permasalahan dari bantuan ini dikarenakan utang yang memiliki bunga terlalu tinggi perlu dilunasi sedangkan pada faktanya nominal bunga yang perlu dilunasi negara tersebut telah melebihi nominal uang yang dipinjamnya.
3. Bantuan melalui penanaman modal, sebagai usaha untuk mencapai pasar, dan juga memperluas proses perubahan sosial ekonomi, serta pemindahan industri, negara yang bertindak sebagai pemberi bantuan merasakan jika terdapat teknologi yang baru dapat menghasilkan suatu kemajuan. Maka dari itu perpindahan capital serta pengiriman teknologi yang sekaligus memberi keringanan untuk impor serta kolaborasi penggantian industri perlu dilakukan.

Bantuan luar negeri juga dapat dikatakan sebagai *international aid* karena bisa didefinisikan terjadinya pengalihan sumberdaya negara terhadap negara yang lainnya, secara umum terdapat sebuah kehendak agar lebih bermanfaat bagi negara yang menerima. *Development aid* merupakan salah satu bentuk dari bantuan luar negeri atau bisa disebut sebagai bantuan pembangunan. Pada penelitian ini, *development aid* ini diterapkan karena adanya peran dari *World Bank* dalam memberikan bantuan luar negeri berupa bantuan pembangunan di Jalur Gaza untuk memulihkan perekonomian di wilayah tersebut. *Development aid* adalah sebuah bentuk bantuan di mana lembaga donor atau pemerintahan suatu negara memberikannya untuk mendorong usaha pembangunan ekonomi, sosial politik, dan lingkungan negara-negara berkembang. Berbeda dengan *humatarian aid,* fokus dari bantuan ini secara umum lebih ditujukan pada upaya yang memiliki rentan waktu yang panjang contohnya seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastrukur disuatu wilayah.(Siregar, 2020)

Bantuan yang diberikan oleh *World Bank* terhadap Gaza ini bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi wilayah tersebut agar seperti sebelumnya. Bagi *World Bank,* bantuan ini dilakukan bertujuan untuk pengembangkan kemitraan *Partnership for Insfrastructure Development in the West Bank and Gaza Multy-Donors Trust Fund* (PID MDTF) agar dapat meningkatkan cakupan, kualitas, dan keberlanjutan infrastruktur di Gaza. Menurut Carol Lancaster, fungsi bantuan luar negeri selain memiliki kegunaan bagi negara yang menerima juga sebagai berikut:

**“Sebagai tanda persetujuan diplomatik, menambah kekuatan militer sekutu, memberikan penghargaan kepada pemerintah negara lain karena berperilaku sesuai kehendak pihak donor, memperluas pengaruh budaya pihak donor serta sebagai usaha untuk mendapatkan akses perekonomian di negara penerima.”**(Lancaster, 2007)

Ini menunjukkan bahwa diplomasi dapat terjadi dengan adanya bantuan luar negeri, terutama jika bentuk bantuan berupa pembangunan. Kepentingan nasional dari setiap negara dapat dipenuhi dengan adanya bantuan pembangunan tersebut. Selain keuntungan yang diterima oleh negara berkembang, keuntungan akses yang dapat terbuka serta hubungan menjadi lebih erat dengan negara berkembangpun dapat dirasakan oleh negara maju, serta institusi keuangan.(Siregar, 2020)

Carol membenarkan adanya sebuah upaya dari setiap negara maju agar *national interest* negaranya dapat terpenuhi. Ia membagi beberapa fokus serta tujuan dari bantuan yang diberikan untuk negara berkembang dari setiap donor, pembagian tersebut terbagi menjadi tiga fokus:(Lancaster, 2007)

1. Diplomasi, bentuk usaha dalam menumbuhkan pandangan dari negara yang menerima terhadap negara pendonor.
2. Komersial, agar keuntungan penanaman modal, ekonomi, serta perdagangan yang diterima negara pendonor dapat ditingkatkan.
3. Pembangunan, menekankan penggunaan bantuan yang diberikan negara pendonor untuk bidang pembangunan negara serta masyarakat di kawasan negara berkembang.

Program *Multy-Donors Trust Fund* (MDTF) yang diciptakan oleh *World Bank* untuk Gaza dapat digolongkan sebagai suatu rezim, hal ini dapat diamati dari substansinya yang terdapat pengaturan mengenai prinsip, norma, aturan, dan juga prosedur relasi. Secara popular, rezim kerap didefiniskan sebagai “*sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors’ expectations converge in a given area.”*(Krashner, 1983)Program MDTF sesuai dengan interpretasi rezim tersebut. Dengan begitu, kesesuaian tersebut menjadi awal penelitian mengenai Program yang diciptakan *World* Bank dapat dikaji lebih mendalam dan bermanfaat dengan meletakkanya dalam pendiskusian teoritis mengenai rezim mengingat cukup populer diperbincangkan.(Polimpung, 2010)

Diskusi yang terjadi antara teoritis Hubungan Internasional tentang pengklasifikasian kerjasama pada tingkatan antar negara, ataupun kerap dikatakan rezim internasional pada tahun 1980-an. Pokok perbincangan yang menguasai pada masa itu berhubungan dengan bagaimana rezim berperan untuk memberi fasilitas terhadap kerjasama pada lingkungan yang bersifat anarki. Asumsi dari kubu neoliberal instutioalis menyatakan bahwa kemungkinan kerjasama dapat terlaksana pada saat aktor yang bekerjasama mempunyai kesamaan *interest* dari keuntungan kerjasama yang dijalin.(Polimpung, 2010) Semua aktor yang terlibat dalam kerjasama tersebut akan menerima *absolute gain,* contohnya seperti perdamaian dunia, mencegah menipisnya lapisan ozon, penstabilan ekonomi makro dunia, dsb. Kesimpulannya, kerjasama yang terjadi, bahkan didalam lingkungan yang bersifat anarki sekalipun memiliki aspek utama yang dapat dikatakan sebagai keuntungan absolut atau *absolute gain.*

Namun menurut realis beranggapan bahwa konsep *absolute gain* telah merabunkan lawan kubunya (neoliberal) tersebut pada kemungkinan terjadinya manipulasi kerjasama yang dilakukan sengaja. Seorang realis bernama Grieco dan sekaligus salah seorang yang paling vokal dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa ketidakefektifan dapat terjadi pada bentuk kerjasama tersebut ketika terdapat salah seorang aktor kerjasama yang bertindak curang. Ia berpendapat neoliberal institusionalis terlalu memandang rendah anarki; Karena tindakan curang tidak menjadi permasalahan didalamnya dan hal tersebut akan menjadi kendala besar yang memungkinkan terjadi didalam sebuah kerjasama disaat tidak adanya kekuasaan pusat didalam dunia internasional.(Wibisono, 2006) Rezim internasional pada umunya memiliki sifat yang terbuka, diantara segenap aktor, laporan telah tersalurkan secara menyeluruh. Akibatnya, setiap pihak dapat memperkirakan keuntungan yang telah didapatkan oleh pihak lain. Masing-masing pihak mengalami kekhawatiran apabila terdapat pihak lain yang akan menerima bonus diluar dari *absolute gain.* Bahkan sesuatu yang paling buruk pun bisa terjadi di mana terdapat pengunduran diri dari salah satu pihak di tengah perjalanan pelaksanaan kerjasama ini, dan hal ini pastinya bisa saja terjadi. Dan yang terjadi selanjutnya adalah kerjasama tidak akan terwujud karena dihalangi oleh keegoisan masing-masing pihak.(Polimpung, 2010)

Setelah diskusi dari kedua kubu yang pada akhirnya hanya menimbulkan pesimistis, seseorang bernama John Ruggie beranggapan meski rezim dan institusi tidak dapat dipisahkan, namun kedua hal tersebut sama sekali berbeda: rezim adalah *software* dari institusi, Ruggie mengamati terdapat faktor lain diantara rezim dan institusi, yakni institusionalisasi. Faktor tersebut yang menjadi alasan Ruggie beranggapan bahwa proses institusionalis yang dilalui rezim dapat mewujudkan sebuah institusi. Institusi maupun organisasi internasional tidak dapat dijadikan permulaan dalam pembahasan mengenai rezim, seperti kearah mana rezim ini terinstitusionalis, tetapi proses dari institusionalisasinya sendiri yang perlu diperhatikan terlebih dahulu.(Ruggie, 1998)

Menurut kebenarannya, proses institusionalisasi di dunia internasional menurut Ruggie memiliki tiga level berbeda yakni: *epistemic community, international regime,* serta *international organization.*(Ruggie, 1975)Jaringan antara pihak-pihak yang mempunyai keselarasan dalam perspektif tertentu terhadap dunia/realitas (*episteme*) yang dikatakan sebagai *epistemic community.*(Haas, 1992)Perspektif tersebut dapat terlihat dari tanggapan setiap pihak pada sebuah fenomena global. Dan hal tersebut selanjutnya akan membangun sebuah tanggapan secara kolektif yang jika terdapat kesepakatan lanjutan, ditafsir kepada sebuah “seperangkat tujuan dan harapan bersama, aturan dan regulasi, rencana kerja, dan komitmen finansial” rezim.(Ruggie, 1975) Jika terjadi kesepakatan dari para aktor yang merupakan negara, yang akan terjadi adalah pengesahan sebuah rezim menjadi rezim internasional. dan yang lebih kongkret yaitu rumah untuk rezim internasional yang disebut sebagai institusi ataupun organisasi internasional yang berperan sebagai lokasi pengimplementasian rencana serta pengevaluasian rezim dilakukan. Perbedaan yang tampak diantara keduanya yakni dilihat dari cikal-bakal organisasi internasional adalah rezim internasional namun pada sisi lain institusi atau organisasi internasional tersebut dapat menjadi wadah bagi rezim internasional dalam pengawasan impelementasnya, pengembangan, dan juga bisa saja terjadi penciptaan versi-versi baru.(Polimpung, 2010)

Sejauh ini John Ruggie dapat memaparkan proses terciptanya sebuah rezim internasional serta bagaimana kelanjutannya didalam institusi internasional. Berawal dari keserasian kepercayaan serta perspektif hidup. Interaksi diantara penganut kepercayaan menghasilkan sebuah keterikatan. Keterikatan tersebut dalam bagiannya akan mencetuskan gagasan lahirnya sebuah rezim internasional, maupun aktualisasi rasional atas kepercayaan serta perspektif hidup sebelumnya. Dan akhirnya, diciptakanlah suatu institusi internasional guna mengembangkan serta melestarikan rezim tersebut.

## Hipotesis Penelitian

**Jika Implementasi bantuan program pembangunan infrastruktur di Jalur Gaza melalui program *Partnership of Infrastructure Development Multy-Donors Trust Fund* (PID MDTF) berjalan dengan baik, menjadikan infrastruktur yang berada di kawasan Jalur Gaza dapat mengalami perbaikan dan berkembang pesat.**

## Operasionalisasi Indikator Variable Hipotesis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis**  **(Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| Variabel bebas:  **Jika Implementasi bantuan pembangunan infrastruktur dari *World Bank* melalui program *Partnership for Infrastructure Development Multy-Donors Trust Fund* berjalan dengan baik** | 1. Bantuan pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Palestina (khususnya Jalur Gaza). | 1. Data (fakta). Terdapat sebuah rencana dari *World Bank* untuk menjalankan pembangunan infrastruktur melalui program PID MDTF.   Sumber:  <https://www.worldbank.org/en/programs/palestinian-partnership-for-infrastructure-trust-fund> |
| Variabel terikat:  **Menjadikan infrastruktur yang berada di Jalur Gaza dapat mengalami perbaikan dan berkembang pesat.** | 1. Pembangunan di sektor perkotaan, energi, pasokan air,pengelolaan limbah padat, dsb. | 1. Data (fakta). Terdapat sebuah proyek dari *World Bank* mengenai pembangunan dibeberapa sektor yang dikembangkan melalui program PID MDTF.   Sumber:  <https://www.worldbank.org/en/programs/palestinian-partnership-for-infrastructure-trust-fund#5> |

## Skema Operasionalisasi Variabel Hipotesis

